



# TAHUN 2023

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN JUAI**

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Juai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Juai dan telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Juai tahun 2023 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Juai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

**CAMAT JUAI**  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Juai Tahun 2023 ini disusun untuk menyajikan laporan capaian indikator kinerja dan evaluasi atas tujuan dan sasaran yang merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Juai selama tahun 2023. Adapun penganggaran kegiatan tersusun dalam 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Juai tahun 2023 setelah dilakukan penyusunan kembali pohon kinerja dan cascading adalah terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik, dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM). Capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah sebesar 78,62 dengan rasio capaian sebesar 100,02%. Tujuan strategis adalah merupakan perjanjian kinerja kepala skpd dalam hal ini camat.

Sedangkan untuk capaian sasaran strategis tahun 2023 yang merupakan perjanjian kinerja pejabat pengawas (kepala seksi) dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif, realisasinya adalah 60 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau persentase capaian tahun ini 100%.
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dengan indikator kinerja yaitu persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, realisasinya adalah sebesar 100%.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan dan realisasi sebesar 100%.

4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi keuangan, realisasinya adalah sebesar 100%.

Alokasi anggaran Kecamatan Juai tahun 2023 berjumlah Rp. 4.812.679.541,00 yang dengan rincian anggaran belanja operasi sebesar Rp. 4.699.329.941,00 dan belanja modal sebesar Rp. 113.349.600,00. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.432.197.076,00 atau sekitar 92,09% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.4.327.162.076,00 atau 92,08% dan belanja modal sebesar Rp.105.035.000,00 atau sekitar 92,66%.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Juai Tahun 2023 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kantor Kecamatan Juai dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.

Juai, Februari 2024

**CAMAT JUAI**



**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	20
1.1. LATAR BELAKANG .....	20
1.2. LANDASAN HUKUM .....	21
1.3. TUJUAN.....	21
1.4. GAMBARAN UMUM SKPD .....	22
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA).....	27
2.2 Rencana Kerja (RENJA).....	20
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	26
2.4 Perjanjian Kinerja (PK).....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
3.2 REALISASI ANGGARAN .....	25
3.3 ANALISIS KINERJA LAINNYA .....	29
BAB IV PENUTUP .....	33
4.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SKPD BARU.....	20
4.2. RANGKUMAN SINGKAT CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
4.3. UPAYA PERBAIKAN.....	20

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan ....	24
Tabel 1. 2 Daftar nominatif PNS Kecamatan Juai .....	24
Tabel 2. 1 Data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran renstra 2021-2016.....	28
Tabel 2. 2 Daftar program kegiatan Renja Perubahan 2021 .....	20
Tabel 2. 3 Data Indikator Kinerja Utama Kecamatan Juai berdasarkan PK baru.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
Tabel 2. 4 Data Perjanjian Kinerja Camat 2021 berdasarkan PK baru.....	20
Tabel 3. 1 Daftar capaian kinerja utama Kecamatan Juai sesuai PK baru.....	21
Tabel 3. 2 Rincian realisasi anggaran per 31 Desember 2021 .....	25
Tabel 3. 3 Data analisis efesiensi anggaran dan kinerja TA 2021 sesuai PK baru .....	29
Tabel 4. 1 Daftar rincian capaian indikator perjanjian kinerja tahun 2021 .....	20

# DAFTAR GAMBAR

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Juai di Kabupaten Balangan .....	22
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juai Per 31 Desember 2022 .....	23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kecamatan Juai Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Juai cukup berat, maka agar dapat berhasil diperlukan adanya Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Juai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Juai, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) berupa Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam tahun 2023.

Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam sebuah LKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kecamatan Juai untuk pencapaian dalam tahun 2023. Evaluasi atas LKIP berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Kecamatan Juai dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Kecamatan Juai harus terus menerus mengalami perubahan ke arah perbaikan. Rencana Strategis Kecamatan Juai yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan pelayanan kecamatan dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan masyarakat terkait layanan kecamatan dapat terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Juai secara nyata dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat



umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan

## **1.3. TUJUAN**

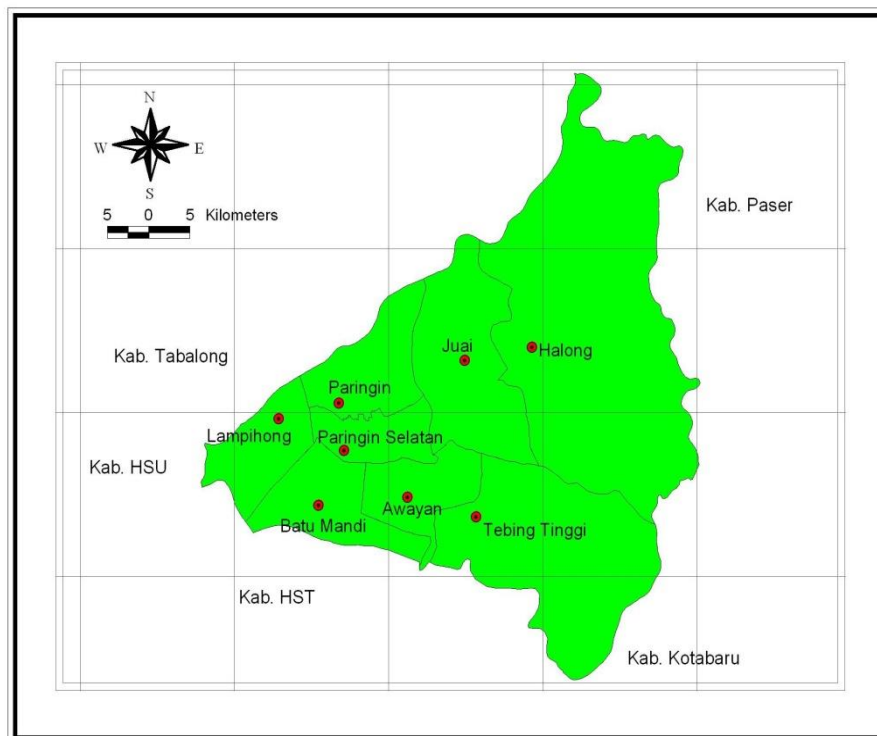
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2023. Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Juai dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Kecamatan Juai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

#### 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Kecamatan Juai secara keseluruhan memiliki luas + 386,88 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 21 Desa dan memiliki jumlah penduduk Laki-laki 7.941 Perempuan 7.401 jumlah 15.342 Jiwa. Dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong sebelah Utara, Kecamatan Halong sebelah Timur, Kecamatan Awayan sebelah Selatan dan Kecamatan Paringin sebelah Barat.



Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Juai di Kabupaten Balangan

Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan yang dipimpin Camat mempunyai tugas :

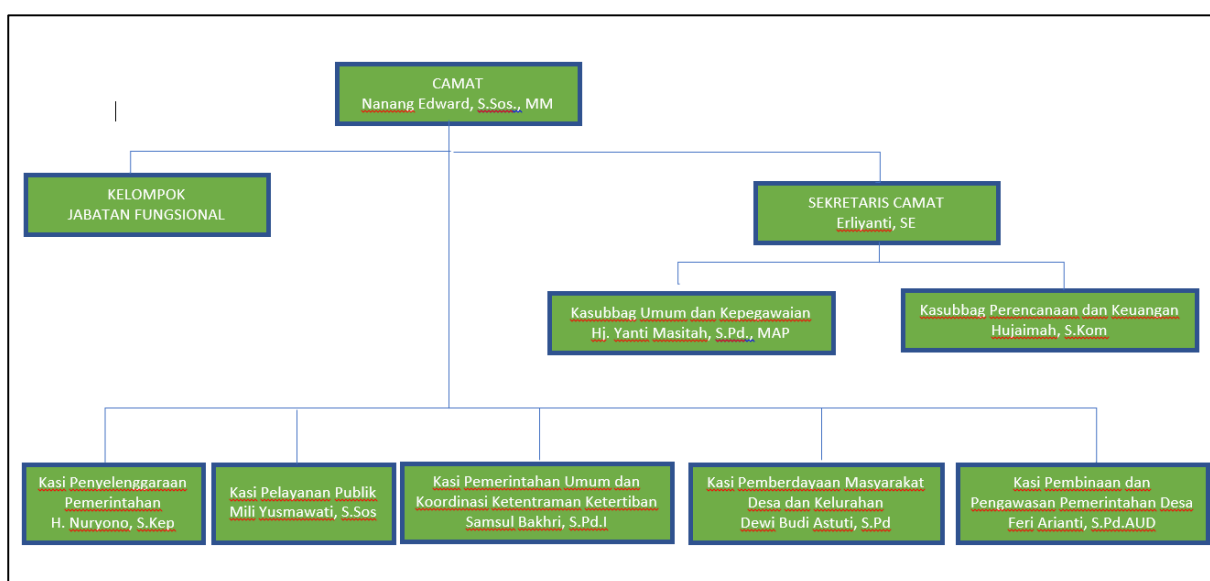
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas yang diemban kecamatan di Kabupaten Balangan, Camat sebagai kepala/pimpinan SKPD di kecamatan memiliki stakeholder sebagaimana susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
3. Seksi penyelenggaraan pemerintahan
4. Seksi pelayanan publik
5. Seksi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban
6. Seksi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
7. Seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
8. Kelurahan
9. Kelompok jabatan fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Juai Kabupaten Balangan per 31 Desember 2023 nampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juai Per 31 Desember 2023

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pejabat struktural dan fungsional dari Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Daftar jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOLONGAN	JLH (ORG)
KANTOR CAMAT JUI	17	SD	-	I/a	-	I	-
		SLTP	4	I/b	-	II	5
		SLTA	3	I/c	-	III	10
		D1	-	I/d	-	IV	2
		D2	-	II/a	2		
		D3	-	II/b	-		
		D4	-	II/c	2		
		S1	6	II/d	1		
		S2	4	III/a	3		
		S3	-	III/b	-		
				III/c	4		
				III/d	3		
				IV/a	2		
				IV/b	-		
				IV/c	-		
				IV/d	-		
				IV/e	-		

Sedangkan nama Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Juai Kabupaten Balangan baik pejabat struktural maupun fungsional umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Daftar nominatif PNS Kecamatan Juai

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
01	Nanang Edward,S.Sos.,M.M 19800127 200604 1 016	Pembina (IV/a)	Camat
02	Erliyanti, SE 19851020 201001 2 031	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Camat

03	Hj. Yanti Masitah,S.Sos.,M.Ap 19670319 198703 2 009	Pembina (IV/a)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
04	Mili Yusmawati, S.Sos 19801117 200604 2 024	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pelayanan Publik
05	H. Nuryono, S.Kep 19730507 199602 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
06	Dewi Budi Astuti,S.Pd 19820305 201001 2 017	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemberd. Masy. Desa dan Kelurahan
07	Samsul Bakhri, S.Pd.I 19831125 200801 1 006	Penata (III/c)	Kasi Pemerintahan Umum & Koordinasi Trantib
08	Feri Arianti, S.Pd.AUD 19840215 200701 2 002	Penata (III/c)	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
09	Hujaimah,A.Md 19880212 201001 2 016	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
10	Muhammad Aditya Pratama, SE 19910214 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11	Yusnani 19770501 200701 1 016	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
12	Akhmad Basuki 19780719 200701 1 007	Penata Muda III/a	Staf Binwasdes
13	Saihani 1977052 200906 1 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan
14	Mursada 19710215 200701 1 030	Pengatur (II/c)	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian
15	Ali Sadikin 19680816 198804 1 001	Pengatur (II/c)	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16	Misnu Raga 19690718 200701 1 029	Pengatur Muda (II/a)	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17	Ruslan 19690330 2021212 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian

## 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika LKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika laporan.
- Bab II : Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- Bab III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Juai mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Hal ini dilakukan dengan cara mewujudkan tata kelola pemerintah kecamatan yang baik di lingkungan wilayah Kecamatan Juai.

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Juai sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra penyesuaian tahun 2021-2026 adalah terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun nilai IKM tersebut didapatkan dari penilaian atas semua pelayanan publik yang dilakukan oleh semua kasi dan kasubbag di Kecamatan Juai.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan sasaran dari tujuan SKPD Kecamatan Juai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dengan indikator kinerja jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, dengan indikator kinerja persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani.
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan serta persentase desa yang tertib administrasi keuangan.

Adapun data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran Kecamatan Juai tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran renstra 2021-2016

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,75
			%	%	%	%	%	%
	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif	-	-	60	70	80	90
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan	-	-	100%	100%	100%	100%
		persentase desa yang tertib administrasi keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%



## 2.2 RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Juai terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kecamatan Juai TA 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Kinerja	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Baik (67,00)	3.825.463.341
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	91.990.700
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75.588.600
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.879.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	10.522.500



	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12 bulan	2.905.008.991
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang Per Bulan	2.798.827.791
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	106.181.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	81.600.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	81.600.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	323.247.400
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.460.900
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.057.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	125.640.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.089.000



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	213.705.900
	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	70.536.100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.336.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.833.800
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	209.910.350
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	90.346.350
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	119.564.000
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	96.268.100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	86.217.700



	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	86.217.700
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	100%	10.050.400
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	10.050.400
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa	100%	199.160.300
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100%	74.046.600
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.129.200
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	63.087.400



	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.830.000
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	125.113.700
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	125.113.700
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sekto	100%	119.878.800
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentaser koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	119.878.800
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	119.878.800
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa tertib administrasi umum	100%	341.236.500



	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	341.236.500
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450 Orang	143.414.100
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	197.822.400
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	230.672.500
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	230.672.500



	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	89.563.900
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	88.390.200
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	52.718.400

### 2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Juai pada perencanaan kinerja (2021-2026) dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan Publik kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Juai</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam memberikan layanan kepada warga masyarakat</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Nilai rata-rata dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per semester terhadap pelayanan publik yang diberikan seksi pelayanan dan kesejahteraan social</p>	Camat Juai	Seksi Pelayanan Publik



			<p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>		
2	Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	<p><b>Makna Indikator :</b> Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memiliki susunan kepengurusan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai sarana bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah LKD yang aktif pada seluruh desa di Kecamatan Juai</p> <p><b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri</p>	Camat Juai	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	<p><b>Makna Indikator :</b> Tingkat ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan</p> <p><b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai indikator bagi Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dalam menjaga kondusifitas wilayah kecamatan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terjadi dikali 100%</p>	Camat Juai	Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban





			<b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	<b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan  <b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai Indikator bagi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam memberikan pembinaan administrasi pemerintahan  <b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah LPPD dan laporan kinerja BPD yang disampaikan dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 2 dikali 100%  <b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri	Camat Juai	Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
		Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	<b>Makna Indikator :</b> Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Wilayah Kecamatan Juai  <b>Alasan Pemilihan :</b> Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa  <b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah Desa yang Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 100%  <b>Sumber/Referensi Indikator :</b> Analisa Mandiri, berdasarkan amanat permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa	Camat Juai	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



## 2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023 maka Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 menurut perencanaan kinerja dapat dilihat pada tabel perjanjian kinerja eselon III dan IV sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Data Perjanjian Kinerja bagi Camat TA 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
01	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	87,60
02	Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	60 LKD
03	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%
04	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya ada beberapa hal yang diukur yaitu:

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut adalah data capaian sasaran kinerja Kecamatan Juai tahun 2023 berdasarkan perencanaan kinerja (renstra penyesuaian 2021-2026).

Tabel 3. 1 Capaian sasaran kinerja pertama Kecamatan Juai sesuai PK

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,59	87,60	87,62	100,02%	87,75	99,85	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	99,97%

Adapun penjelasan dari capaian kinerja kepala SKPD (camat) di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 yang disusun oleh Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Juai. Nilai rata-rata IKM Kecamatan Juai didapat dari jumlah IKM semester I dan Semester II dibagi 2 (dua).
2. Serapan anggaran tahunan sebesar 100% didapatkan dari realisasi anggaran sebesar Rp. 96.268.100,- dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.238.100,- atau sebesar 99,97%.

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan kendala/faktor penghambat dari pelaksanaan upaya peningkatan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Juai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Proses penganggaran yang kurang maksim

Walaupun target tercapai namun sebenarnya hasilnya masih dapat dimaksimalkan lagi jika anggaran yang disediakan memuat pendanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik.

2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksinya.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
4. Kurangnya pengawasan internal terhadap pencapaian target kinerja masing-masing ASN.

Beberapa hal yang dapat menjadi solusi dan upaya perbaikan capaian kinerja di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan proses perencanaan anggaran baik dari segi penentuan belanja maupun besaran belanja agar sesuai dengan rencana realisasi.
2. Penempatan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksinya serta sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
3. Meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia dengan mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi.
4. Menganggarkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja SKPD.
5. Meningkatkan pengawasan internal terhadap pencapaian target kinerja ASN dan meningkatkan peran aktif ASN bersangkutan dalam melaporkan hasil capaian kerjanya masing-masing.

Tabel 3. 2 Capaian sasaran kinerja kedua Kecamatan Juai sesuai PK

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1.	jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif	-	60	60	100%	90	66,67%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	99,97%

Target jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif pada tahun 2023 adalah sebanyak 60 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan telah tercapai 100%. Adapun faktor pendukung tercapainya target sasaran kinerja kedua ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang secara tidak langsung mendukung upaya peningkatan kapasitas LKD di desa.

2. Adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara kecamatan dan desa dalam pendataan dan pembinaan LKD aktif di desa.
3. LKD yang telah terbentuk memiliki struktur organisasi/kepengurusan sehingga memenuhi persyaratan LKD aktif.
4. Serapan anggaran sebesar Rp. 194.011.100,- dari anggaran sebesar Rp. 194.031.100,- atau sebesar 99,99%.

Tabel 3. 3 Capaian sasaran kinerja ketiga Kecamatan Juai sesuai PK

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1.	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	99,81%

Berdasarkan data tersebut di atas dinyatakan bahwa capaian indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani adalah 100%. Artinya semua gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan ke Kecamatan Juai melalui kasi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban telah ditangani dengan baik. Adapun faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang menyediakan dana untuk pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam dan desa dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.
2. Serapan anggaran sebesar Rp. 262.783.700,- dari anggaran sebesar Rp. 263.292.900,- atau sebesar 99,81%.

Tabel 3. 4 Capaian sasaran kinerja keempat Kecamatan Juai sesuai PK

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Kinerja 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Akhir	Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi	Realisasi / Capaian terhadap RPJMN	Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program)
			Target	Realisasi	Capaian						
1.	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	92,64%
2.	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	99,99%

Berdasarkan data tersebut di atas dinyatakan bahwa terdapat 2 (dua) indikator tercapainya sasaran kinerja keempat Kecamatan Juai berupa meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu persentase desa tertib administrasi pemerintahan dan persentase desa tertib administrasi keuangan. Adapun capaian dari kedua indikator tersebut adalah 100%. Adapun faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formulasi perhitungan capaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan adalah Jumlah LPPD dan laporan kinerja BPD yang disampaikan dibagi jumlah seluruh desa dibagi 2 dikali 100% sedangkan indikator persentase desa tertib administrasi keuangan dicapai dengan formulasi perhitungan jumlah desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa dibagi jumlah seluruh desa dikali 100% dimana semua desa melaksanakan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Adanya keselarasan penganggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kedua indikator tersebut di atas.
3. Serapan anggaran untuk capaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan sebesar Rp. 266.227.300,- dari anggaran sebesar Rp. 287.386.300,- atau sebesar 92,64% dan indikator persentase desa tertib administrasi keuangan serapan anggaran sebesar Rp.141.108.400,- dari anggaran sebesar Rp. 146.237.600,- atau sebesar 96,49%.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah Rp. 4.812.679.541,00 yang meliputi belanja operasi berjumlah Rp. 4.699.329.941,00 dan belanja modal berjumlah Rp. 113.349.600,00. Anggaran belanja operasi terdiri dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 2.798.827.791,00 dan anggaran belanja barang sebesar Rp.1.900.502.150,00. Sedangkan anggaran yang berhasil direalisasikan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.432.197.076,00 atau sekitar 92,09% dan terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.4.327.162.076,00 atau 92,08% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.514.300.984,00 atau sekitar 89,93% dan belanja barang sebesar Rp.1.812.861.092,00 atau sekitar 95,39 % serta belanja modal sebesar Rp.105.035.000,00 atau sekitar 92,66%.

Berikut adalah data perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi masing-masing program kegiatan tahun anggaran 2023 pada kecamatan Juai per 31 Desember 2023:

Tabel 3. 5 Rincian realisasi anggaran per 31 Desember 2023

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Rasio Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/KabupatenKota	3.825.463.341	3.466.709.276	90,62
1.1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	91.990.700	91.240.700	99,18
1.1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	75.588.600	75.578.600	99,99
1.1.2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	5.879.600	5.659.600	96,26
1.1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.522.500	10.002.500	95,06
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.905.008.991	2.617.065.144	90,09

1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.798.827.791	2.514.300.984	89,83
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.181.200	102.764.160	96,78
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.600.000	80.921.800	99,17
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	81.600.000	80.921.800	99,17
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.247.400	314.932.800	97,43
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.460.900	1.460.900	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.057.500	107.742.900	92,84
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	125.640.000	125.640.000	100
1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.089.000	80.089.000	100
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	213.705.900	156.376.132	73,17
1.5.1	Penyediaan Surat Menyurat	70.536.100	50.536.100	71,65
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.336.000	98.040.032	72,44
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.833.800	7.800.000	99,57
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.910.350	206.172.700	98,22
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	66.750.000	64.606.550	96,76%



	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan			
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.346.350	86.608.700	95,86
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	96,268,100	96,238,100	99,97
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	86.217.700	86.217.700	100
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	86.217.700	86.217.700	100
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	10.050.400	10.020.400	99,7
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.050.400	10.020.400	99,7
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	199,160,300	199,130,300	99,98
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.046.600	74.036.600	99,99
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.129.200	5.119.200	99,81
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	63.087.400	63.087.400	100

3.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.830.000	5.830.000	100
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	125.113.700	125.093.700	99,98
3.2.1	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	125.113.700	125.093.700	99,98
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	119,878,800	119,478,800	99,67
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	119,878,800	119.478.800	99,67
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	119,878,800	119.478.800	99,67
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	341.236.500	339.053.100	99,36
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	341.236.500	339.053.100	99,36
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	143.414.100	143.304.900	99,92

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
5.1.2	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	197.822.400	195.748.200	98,95
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	230,672,500	211,587,500	91,73
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	230.672.500	211.587.500	91,73
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	89.563.900	70.479.100	78,69
6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	88.390.200	88.390.200	100
6.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	52.718.400	52.718.200	100

### 3.3 ANALISIS KINERJA LAINNYA

Dalam analisis kinerja lainnya atas akuntabilitas kinerja tahun 2023 berdasarkan perencanaan kinerja tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel analisis efesiensi capaian anggaran dan kinerja atas sasaran dan indikator sasaran kecamatan juai tahun 2023 berikut ini.

Tabel 3. 6 Data analisis efesiensi anggaran dan kinerja TA 2023 sesuai PK

Sasaran / Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sasaran I : Meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik</b>	<b>87,60</b>	<b>87,62</b>	<b>100,02%</b>	<b>96.268.100</b>	<b>96.238.100</b>	<b>99,97%</b>	<b>Relevan dan Efektif</b>

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	86.217.700	86.217.700	100	Relevan dan Efektif
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	100%	10.050.400	10.020.400	99,70	Relevan dan Efektif
<b>Sasaran II : Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>194.031.100</b>	<b>194.011.100</b>	<b>99,99%</b>	<b>Relevan dan Efektif</b>
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	63.087.400	63.087.400	100%	Relevan dan Efektif
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	5.830.000	5.830.000	100%	Relevan dan Efektif
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	50 Keluarga	50 Keluarga	100%	125.113.700	125.093.700	99,98%	Relevan dan Efektif

	Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas							
<b>Sasaran III : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan</b>	<b>Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>262.292.900</b>	<b>262.783.700</b>	<b>99,81</b>	<b>Relevan dan Efektif</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	119.878.800	119.478.800	99,67%	Relevan dan Efektif
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	450 Orang	450 Orang	100%	143.414.100	143.304.900	99,22%	Relevan dan Efektif

	Negara Kesatuan Republik Indonesia							
<b>Sasaran IV : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administra-si pemerin- tahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>287.386.300</b>	<b>266.227.300</b>	<b>92,64%</b>	<b>Relevan dan Efektif</b>
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Doku- men	1 Doku- men	100%	197.822.400	195.748.200	98,95%	Relevan dan Efektif
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Doku- men	1 Doku- men	100%	89.563.900	70.479.100	91,73%	Relevan dan Efektif
<b>Sasaran IV : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>146.237.800</b>	<b>146.227.800</b>	<b>99,99%</b>	<b>Relevan dan Efektif</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lemba- ga Kemas- yarakat- tan	4 Lemba- ga Kemas- yarakat- tan	100%	5.129.200	5.119.200	99,81%	Relevan dan Efektif
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Doku- men	1 Doku- men	100%	88.390.200	88.390.200	100%	Relevan dan Efektif

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Doku- men	1 Doku- men	100%	52.718.400	52.718.400	100%	Relevan dan Efektif
--	---	----------------	----------------	------	------------	------------	------	---------------------------

Sedangkan berdasarkan hasil rekomendasi yang tercantum dalam dokumen laporan hasil evaluasi LKIP tahun 2022 Nomor : 700/134/ INSPEKTORAT-BLG/IV/2023 tanggal 28 April 2023 maka rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Kecamatan Juai di tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Rencana Aksi TL LHE AKIP Kecamatan Juai Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1.	Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja	Dokumen SOP perencanaan kinerja akan disusun dan ditetapkan segera
2.	Memformalkan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan kinerja memberikan informasi, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu namun informasi yang berkaitan dengan crosscutting akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan kinerja selanjutnya
3.	Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis	Dokumen SOP/pedoman teknis akan disusun dan ditetapkan segera
4.	Mengajukan usulan peraturan/surat keputusan Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang	usulan peraturan/SK Bupati terkait pengaturan penempatan kerja pegawai akan dikoordinasikan dan diusulkan segera

	berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai	
5.	Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja (LKjIP tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan revidi LPPD	Kecamatan Juai akan menyampaikan surat permintaan revidi laporan kinerja tahun 2023 ke Inspektorat setelah penyusunan laporannya selesai atau setelah tanggal 28 februari 2024
6.	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 telah memuat narasi rasio capaian tahun 2022 dengan target 2026 namun belum dimuat dalam bentuk tabel data sehingga untuk dokumen LKjIP tahun 2023 hal tersebut akan lebih diperhatikan dan dimuat
7.	Dokumen Laporan Kinerja memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 telah memuat mengenai perbandingan realisasi kinerja 2022 dengan realisasi kinerja 2021 dan akan terus memuat hal tersebut pada dokumen LKjIP selanjutnya
8.	Dokumen Laporan Kinerja memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)	Dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya akan lebih memperhatikan dan memuat mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)
9.	Menyusun/membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan, evaluasi dilakukan dengan dasar target	Kecamatan Juai akan menyusun dan memformalkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan melakukan evaluasi berkala target kerja rencana aksi SKPD per triwulan



	kinerja yang telah ditetapkan pada rencana aksi sehingga evaluasi dilaksanakan triwulan	
10.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebaiknya dilaksanakan secara berkala sesuai dengan peraturan/pedoman teknis yang telah ditetapkan	Kecamatan Juai akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala sesuai dengan peraturan/pedoman teknis
11.	Melaksanakan perbaikan atas faktor penghambat pada monev dilaksanakan dengan adanya peningkatan realisasi target pada monev triwulan berikutnya	Kecamatan Juai akan memperbaiki faktor penghambat dalam dokumen monev agar dapat dilaksanakan dan meningkatkan realisasi monev triwulan berikutnya
12	menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun berikutnya	Kecamatan Juai telah menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai AKIP 2022 dibandingkan tahun 2021 serta akan menindaklanjuti LHE tahun 2022 untuk peningkatan nilai hasil evaluasi tahun 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SKPD**

Telah dilaksanakan program kegiatan Kecamatan Juai tahun 2023 dengan capaian atas indikator tujuan berdasarkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diasumsikan **berhasil** karena capaiannya sebesar 87,62 dengan target sebesar 87,60.

#### **4.2. RANGKUMAN SINGKAT CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam pelaksanaan tugas fungsi kecamatan juai, seluruh stakeholder di Kecamatan Juai berkomitmen untuk mencapai target perjanjian kinerja masing-masing per 31 Desember 2023 Adapun rincian dari capaian perjanjian kinerja kepala SKPD (camat) pada Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4. 1 Daftar rincian capaian indikator perjanjian kinerja tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan	87,60	87,62	100,02 %
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif	60	60	100%
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	100%	100%	100%
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Persetase desa tertib administrasi pemerintahan	100%	100%	100%
			Persetase desa tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%



#### 4.3. UPAYA PERBAIKAN

Berapa langkah yang dapat ditempuh kecamatan juai untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Mempertahankan kinerja yang sudah dicapai yaitu kinerja dengan capaian “sangat berhasil”.
2. Mengevaluasi kembali segala kekurangan-kekurangan yang masih dimungkinkan ada.
3. Mengatasi segala kendala-kendala/hambatan yang ada dalam pencapaian kinerja.
4. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Juai yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan pelayanan;
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM di Lingkungan Kecamatan Juai.
6. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan prosedur pelayanan kepada masyarakat lebih jelas dan transparan.
8. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus terhadap semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (:LKIP) Kecamatan Juai ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian target tahun 2023. Walaupun penyusunan laporan ini masih jauh dari nilai sempurna namun kami harap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai keberhasilan kinerja Kecamatan Juai Tahun 2023 dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Juai, Februari 2024

**CAMAT JUAI,**



**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**

**NIP. 19800127 200604 1 016**